

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kinerja keuangan merupakan gambaran sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Sedangkan menurut Mulyadi (2016) kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini ruang lingkup dari ekonomi seolah tidak memiliki batasan lagi menyebabkan persaingan menjadi sangat tinggi. Selain itu pada tanggal 9 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi, yang artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Hal tersebut secara tidak langsung sangat berdampak terhadap ekonomi. Pandemi global karena Covid-19 menyebabkan sebagian besar ekonomi utama dunia akan kehilangan setidaknya 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka selama tahun 2020. Namun perkiraan tersebut direvisi dengan kerugian PDB sebesar 4,5%. [IDXChannel.com](https://www.idxchannel.com).

Dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, menyebabkan sentimen publik cukup tinggi terhadap organisasi publik termasuk pemerintah

dikarenakan merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang dimana fungsi dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu elemen yang penting adalah akuntabilitas dan transparansi (Pertiwi, 2015). Seperti halnya di jelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, At-Taubah ayat 105 tentang berkerja dan pertanggungjawaban terhadap hasil dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan pada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah :105).

Dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 105 diatas menjelaskan tentang tanggung jawab, bahwasannya setiap umat Islam di haruskan dalam bekerja agar dilakukan dengan sebaik-baiknya karena kita akan mempertanggung jawabkan hasil dari apa yang telah kita kerjakan kepada Allah SWT, rasul dan orang orang mukmin lainnya akan melihat hasil dari pekerjaan kita. Oleh karena itu organisasi sektor publik di harapkan memiliki kinerja yang baik sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Sleman, 2020). LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) untuk tahun anggaran 2019-2020 Sleman menjadi salah satu kabupaten dengan perolehan pendapatan/penerimaan keuangan tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai nilai 2,841 triliun rupiah dengan belanja sebesar 2,777 triliun rupiah kabupaten Sleman mengalami surplus anggaran sebesar 64 miliar rupiah. Kabupaten Kulon Progo mempunyai pendapatan paling kecil yaitu sebesar 1,672 triliun, dengan surplus 0,04 persen atau sebesar 608 juta rupiah dari total belanja sebesar 1,671 triliun. Oleh karena itu kabupaten Sleman berusaha memberikan hasil terbaik untuk masyarakat dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sleman.

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penunjang urusan keuangan pemerintah yang di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas

Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain: sebagai penunjang keuangan pemerintah, melakukan pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan, evaluasi, pelaporan dan menyusun rencana kerja, Serta melaksanakan tugas dari bupati sesuai dengan fungsi dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ([bkad.Slemankab.go.id](http://bkad.Slemankab.go.id))

Untuk menilai apakah Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sleman telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik maka dilakukanlah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah cara untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi dalam mengolah sumber daya mereka untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Maheiro, 2012) Berikut adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 1.1**  
**Data Laporan Realisasi APBD Per 31 Desember Tahun 2019**

No	Uraian	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Pendapatan	608.615.616.140,00	660.228.727.030,40	108,48
2.	Pendapatan Asli Daerah	608.615.616.140,00	660.228.727.030,40	108,48
3.	Belanja	210.557.079.234,55	660.228.727.030,40	81,33

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (2021), diolah

**Tabel 1.2**  
**Data Laporan Realisasi APBD Per 31 Desember Tahun 2020**

No	Uraian	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Pendapatan	402.475.929.733,00	504.636.348.992,00	125,38
2.	Pendapatan Asli Daerah	402.475.929.733,00	504.636.348.992,00	125,38
3.	Belanja	130.233.942.099,00	106.898.501.645,01	82,08

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (2021), diolah

Pengukuran kinerja keuangannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Berdasarkan laporan realisasi Anggaran APBD tahun 2019 dan 2020 maka kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman cukup baik.

Untuk mengukur kinerja pemerintah secara maksimal tidak dapat di nilai hanya dari *ouput* yang di hasilkan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *ouput* dan *outcome* secara bersama-sama (Purwiyanti, 2017). Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut kita dapat menentukan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan. Pengukuran kinerja yang mencakup ke tiga aspek tersebut adalah *value for money*.

Mardiasmo (2018) menjelaskan *Value for money* adalah sebuah konsep pengelolaan organisasi pemerintah dimana terdapat tiga elemen utama sebagai dasar, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis: merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah dan dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: penggunaan *input* terendah untuk mencapai *ouput* yang maksimum di kaitkan dengan target yang telah di tetapkan. efektivitas: perbandingan antara *outcome* dengan *ouput* dari pencapaian program terlaksana.

Peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan dengan konsep *value for money* antara lain oleh Liando *et al* (2018), Indrayani & Khairunnisa (2018), Hamid & Lamuda (2019), Rusyda & Mildawati (2016), Sulastiningsih & Sulistyowati (2017), dan penelitian terkait elemen *value for money* yaitu efisiensi dan efektivitas oleh Cenissa *et al* (2017). Penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan dari *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan pada organisasi dengan melakukan pengukuran pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas secara terpisah dengan tidak memperhatikan *input, output dan outcome* sebagai satu kesatuan yang merupakan bagian penting untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah secara maksimal. Dalam penelitian ini Analisis pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan terarah dengan memperhatikan *input, output dan outcome* kinerja keuangan secara bersama-sama sehingga hasil dari pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja lebih maksimal.

Perbedaan lainnya pada peristiwa ekonomi, Penelitian ini dilakukan ketika terjadi pandemi Covid 19 sehingga hal tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan organisasi sektor publik ketika terjadinya peristiwa ekonomi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Metode *Value for Money* (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Objek penelitian adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Fokus masalah yang akan diteliti adalah tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.

## **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dan latar belakang penelitian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomis, efektivitas, dan efisiensi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu akuntansi yang lebih mendalam khususnya tentang analisis pengukuran kinerja keuangan pada organisasi sektor publik di tinjau

dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya terkait dengan analisis kinerja keuangan pada organisasi sektor publik/pemerintah, dan di harapkan agar dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi dan fenomena yang ada.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan penerapan metode pengukuran kinerja keuangan dimasa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penialian kinerja terhadap organisasi sektor publik/pemerintahan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini di harapkan menjadi pertimbangan untuk sistem penilaian kinerja keuangan pada organisasi sektor publik/pemerintahan.